

The 5TH International Conference on Social Politics (ICOSOP) “Social Science and New Global Order: South-South Perspective, 13 Agustus 2025, Jakarta, Indonesia

Ilmuwan Sosial dan Konflik Global

Asran Jalal

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: jalalasran@gmail.com

Abstrak

Tujuan umum artikel ini adalah mendiskusikan tentang peran ilmuwan sosial khususnya ilmuwan politik dalam menyikapi konflik global dewasa ini. Tujuan khusus pertama, mendiskusikan ciri konflik global dan implikasi. Kedua, diskusi landasan konseptual peran sosial ilmuwan politik dalam politik global. Ketiga, diskusi peran sosial ilmuwan politik merespon konflik global.

Konflik global yang terjadi berupa perang dan ancaman perang nuklir. Perang seperti perang Palestina-Israel, perang Rusia-Ukrain, perang India-Pakistan, perang Iran-Israel, dan Thailand-Kamboja. Ancaman perang nuklir antara Amerika Serikat (AS)- China dan AS-Rusia. Penyebab perang didominasi oleh kekhawatiran suatu negara terhadap perkembangan persenjataan negara lain yang dianggap mengancam negaranya. Penyelesaian perang dimediasi oleh AS, tanpa peran PBB. Konflik global yang belum menemui solusi yaitu perang Israel-Palestina dan ancaman perang nuklir AS-China. Implikasi konflik global melahirkan gerakan sosial global berupa mendukung kemerdekaan Palestina dan anti perang nuklir. Kedua isu tersebut berkaitan hak bangsa untuk merdeka dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ancaman perang nuklir menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia akan masa depan mereka. Kedua isu tersebut menimbulkan ketidakstabilan politik global.

Ilmuwan politik memiliki tanggung jawab melalui peran sosial dalam merespon konflik global. Ilmuwan politik memiliki landasan teoritik dalam melakukan peran sosial tersebut yakni apa yang dikenal dengan ilmu politik post-behavioralisme. Ilmuwan politik juga memiliki landasan empiris sebagai rujukan melaksanakan peran sosial, sebagaimana yang dilakukan ilmuwan politik pada masanya.

Kata kunci: *konflik global, perang, ancaman perang nuklir, peran ilmuwan politik, post-behavioralisme,*

A. Pendahuluan

Perang dapat karena dipicu oleh negara yang tadinya memiliki kekuatan dominan kemudian muncul negara baru yang memiliki kekuatan yang dapat mengancam negara yang dominan. Negara dominan lama akan memulai perang guna mencagah kekuatan negara baru untuk memperbesar kekuatannya (Copeland, 200).

Konflik global dicirikan dua hal yaitu perang dan ancaman perang nuklir. Perang yang terjadi yaitu perang Palestina-Israel, perang Rusia-Ukrain, perang India-Pakistan, perang Iran-Israel, dan Thailand-Kamboja. Saling ancam perang nuklir antara Amerika Serikat (AS)- China dan AS-Rusia. Perang tersebut dipicu oleh sebab yang berbeda-beda, ada yang khawatir karena meningkatnya kekuatan militer negara lain dan dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi negaranya, Perang antar negara dimaksud telah membawa korban nyawa manusia dan harta benda pada negara-negara yang terlibat perang.

Perang tersebut di atas ada yang sudah berakhir dan ada yang masih berlanjut. Perang yang sudah berakhir yaitu perang India- Pakistan, perang Israel-Iran, dan perang Thailand-Kamboja. Perang yang masih berlanjut yaitu perang Israel-Palestina, perang Rusia-Ukraina. Perang antar negara yang sudah berakhir, bukan dimediasi oleh lembaga internasional seperti PBB, tapi dimediasi oleh AS. Perang Israel-Palestina sampai saat ini belum ada solusi dari PBB. Perang Rusia-Ukraina, meskipun belum berakhir, namun upaya mencari solusi perang sudah dimulai, melalui Presiden AS Donald Trump.

Ancaman perang nuklir antara AS-China meskipun belum terjadi, tanda-tanda ketegangan kedua negara sudah terlihat. Kebijakan Presiden AS Donald Trump menaikkan pajak impor komoditi yang berasal dari negara lain, Presiden China Xi Jinping yang menentang dengan membalas menaikkan pajak impor komoditi yang berasal dari AS. Ancaman Presiden AS dengan mengirim kapal selam bertenaga nuklir

mendekati laut China, direspon oleh China dengan melakukan latihan militer bersama dengan Rusia menggunakan kapal selam bertenaga nuklir.

Konflik global terutama perang Israel-Palestina dan potensi perang nuklir AS-China menimbulkan kekhawatiran masyarakat global dan akan terus mempengaruhi stabilitas politik global. Perang Israel-Palestina berkaitan nasib bangsa untuk merdeka dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan Israel pada rakyat Palestina. Potensi perang nuklir AS-China, berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat global akan masa depan mereka, perang nuklir bila terjadi membawa kerusakan pada tatanan global berupa kerusakan alam dan menghancurkan peradaban manusia. Implikasinya lahir gerakan sosial global yang membela kemerdekaan untuk Palestina dan gerakan sosial anti perang nuklir.

Ilmuwan politik memiliki peran sosial berkontribusi menyikapi perang dan ancaman perang nuklir yang berdampak luas dan membuat ketidakstabilan global. Pertama, peran PBB sebagai institusi formal internasional, gagal memainkan perannya sebagai mediasi memberikan solusi pada perang yang terjadi, dan gagal memelihara tatanan politik global yang dinamis dan stabil. Kedua, posisi ilmuwan politik yang memihak pada objektifitas, memungkinkannya memiliki kebebasan untuk memainkan peran sosialnya. Ketiga, Ilmuwan politik memiliki landasan teoritik untuk melaksanakan peran sosialnya, meskipun masih terdapat perdebatan di kalangan ilmuwan politik yang menganut faham behaviorisme dan mereka yang menganut faham post-behaviorisme tentang peran dimasud. Keempat, ilmuwan politik telah melaksanakan peran sosialnya menyikapi berbagai konflik sosial yang mengancam tatanan masyarakat pada masanya dengan berbagai modelnya.

Artikel ini hendak mendiskusikan peran sosial ilmuwan politik merespon konflik global ini merujuk pada ilmu politik post-behaviorisme sebagai landasan dalam membahas peran dan tanggung jawab ilmuwan sosial merespon konflik global dewasa ini seperti perang Israel-Palestian, perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Iran, perang India-Pakistan, perang Israel-Iran, perang Thailand-Kamboja. Konflik global juga dicirikan ancaman senjata nuklir antara Amerika Serikat (AS)- Rusia dan AS-China. Kondisi tersebut

membawa ketidakpatian tatanan global, karena akan mengancam peradaban manusia. Bahasan terdiri dari pertama, ciri konflik global dan implikasi. Kedua, landasan ilmuwan politik melaksanakan peran dan tanggung jawab sosial menyikapi konflik global. Ketiga, model peran ilmuwan politik merepon konflik global. Keempat, simpulan.

Argumen yang diajukan adalah tidak ada alasan bagi ilmuwan politik untuk menghindari dari peran sosialnya menyikapi konflik global yang mengancam stabilitas tatanan politik global. Posisi ilmuwan politik yang netral- objektif, memiliki landasan teoritik untuk melakukannya, dan memiliki rujukan model peran sosial yang pernah dilakukan ilmuwan politik pada masanya.

C. Ciri Konflik Global dan Implikasi

Copeland (200) menyatakan, perang sangat mungkin dipicu oleh negara yang tadinya memiliki kekuatan dominan kemudian relatif menurun, saat yang sama muncul negara baru yang memiliki kekuatan untuk menentang negara yang dominan. Negara dominan lama akan memulai perang guna mencagah kekuatan negara baru untuk memperbesar kekuatannya. Ciri konflik global dewasa yaitu pertama perang, seperti perang Israel-Palestina, perang Rusia-Ukraina, perang India-Pakistan, perang Iran-Israel, perang Thailand-Kamboja. Kedua, ancaman perang nuklir Amerika Serikat (AS)-Rusia dan AS-China. Konflik global tersebut mempengaruhi dinamika politik global.

Perang Israel-Palestina sudah berlangsung lama, perang ini merubah opini dan peta kekuatan politik internasional ketika terjadi perang pada 7 Oktober 2023 dan masih berlangsung sampai 2025. Perang pada 7 Oktober 2023 diawali serang kelompok Hamas ke Israel membawa korban terbunuh dan terluka. Korban terbunuh pihak Palestina sebanyak 346 orang, dan terluka sebanyak 2.290 orang. Korban di Israel terbunuh 1200 orang dan terluka 5400 orang. Penyebab utama perang, karena rakyat Palestina menganggap tanah Palestina merupakan tanah air mereka, Israel berdalih Palestina merupakan bahagian dari wilayah negaranya (Brown 2019). Konflik Israel-Palestina menjadi problematik. Israel mendapat dukung dari AS dan negara-negara Eropa Barat. Dukungan AS berupa dukungan politik dan bantuan militer, dukungan politik

berupa menggunakan hak veto untuk menghalangi ada kehendak negara-negara anggota yang hendak mengakui Palestina merdeka. Dukungan negara-negara Eropa Barat pada Israel lebih utama pada dukungan politik (Pratiwi, Syarafi, Nauvarian, 2022).

Konflik Israel-Palestina akan terus mempengaruhi dinamika politik Internasional, Pertama, berkaitan dengan hak suatu bangsa untuk merdeka dan menentukan masa depan rakyatnya. Negara-negara anggota PBB yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 2025 berjumlah 149 negara. PBB mengumumkan hal ini setiap tahun dalam rangka Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina. Indonesia termasuk yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal. Sikap politik luar negeri Indonesia yang seperti ini sejalan dengan landasan politik luar negeri Indonesia yakni “anti penjajahan”. Rakyat Indonesia sudah mengalami penderitaan yang dialami penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Bagaimana menderitanya keadaan rakyat Indonesia yang memiliki tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh penjajah untuk kepentingan rakyat dan negaranya, rakyat Indonesia hanya dijadikan budak.

Kedua, menyangkut hak asasi manusia. Genosida yang dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina sampai saat ini terus berlanjut seperti pembunuhan anak-anak Wanita, orang tua. dengan sengaja. Israel menghancurkan bangunan seperti rumah tempat tinggal, rumah ibadah, rumah sakit, dan semua fasilitas gedung perkantoran, dan menutup semua akses bantuan kemanusiaan internasional untuk rakyat Gaza. Menurut informasi yang dirilis media internasional yang punya perhatian pada hak asasi manusia, data korban genosida warga Palestina di Gaza pada 2025 yang dibunuh mencapai 137.600 jiwa. Israel juga menghancurkan berbagai fasilitas seperti rumah tempat tinggal, gedung perkantoran, gedung sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah. Israel juga menutup akses darat, laut, dan udara bagi masuknya bantuan kemanusiaan dari internasional masuk ke Gaza. Kondisi rakyat Palestina dewasa ini adalah tinggal di tenda darurat tanpa makanan, minum, tanpa obat-obatan. Pemerintahan Israel memutuskan hendak mencaplok Palestina, keputusan pemerintahan Israel ini mendapat reaksi dari dunia internasional, keputusan tersebut dianggap melanggar hukum internasional.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan keputusan penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang terhadap kemanusiaan di Gaza. Keputusan ini hanya bersifat formalitas, karena pelaksanaannya tidak bisa berjalan. Mengapa tidak bisa berjalan, karena AS dan negara-negara Uni Eropa dan sekutunya melindungi dan mendukung agresi Israel ke Palestina dan mendukung kebijakan Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Alasan negara-negara tersebut mendukung kebijakan Israel atas Palestina adalah Palestina dianggap wilayah berdiamnya kelompok teroris yang kan mengancam stabilitas di Timur Tengah. Alasan tersebut hanya alasan yang dipermukaan. Negara yang melakukan teror dan pembunuhan adalah Israel, AS mendukungnya, pada hal AS merupakan motor pejuang hak asasi manusia di dunia internasional. Kebijakan AS ini tidak konsisten, membela dan memperjuangkan hak asasi manusia sepanjang sesuai dengan kepentingannya. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan AS mendukung Israel menjajah dan melakukan genosida pada Palestina di landasi kepentingan memelihara penguasaan sumber minyak di negara-negara dengan menggunakan Israel sebagai senjata untuk menakut-nakuti negara-negara Arab?

Pemerintahan negara-negara di dunia termasuk negara-negara Arab bisa saja tidak beraksi terhadap nasib rakyat Palestina, namun gerakan sosial global dari berbagai negara mendukung kemerdekaan dan menentang tindakan Israel melakukan genosida pada rakyat Palestina di Gaza tidak bisa dicegah. Gerakan sosial global semakin lama semakin meluas, jumlah orang yang terlibat, isu yang diangkat, dan aksi nyata. Gerakan sosial anti genosida dan mendukung Palestina merdeka hadir di berbagai belahan dunia, AS, Eropa, Afrika, dan Asia. Isu yang menjadi tema gerakan sosial global adalah “anti genosida di Palestina dan mendukung Palestina merdeka”. Gerakan sosial global ini ditunjukkan dengan aksi nyata mereka memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, meskipun dihalang-halangi oleh tantara Israel. Konflik global tidak akan pernah menemui solusinya, apabila Palestina tidak diberikan hak merdeka dan menghukum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya pada rakyat Palestina. Karena isu Palestina berkaitan dengan hak suatu bangsa untuk merdeka dan hak asasi manusia.

Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung semenjak April 2022 dan masih berlangsung sampai 2025. Perang Rusia-Ukraina diawali ancaman Presiden AS Joe Biden akan memberikan ancaman ekonomi apabila Rusia menyerang Ukraina. Alasan Presiden AS, laporan inteligen AS, Rusia memobilisasi 100 ribu pasukan dan peralatan militer di perbatasan Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin, tidak membatah tuduhan tersebut, karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy condong ke Barat dan hendak menjadi anggota NATO. Rusia dengan Ukraina memiliki hubungan yang dekat, masa Uni Soviet, Ukraina merupakan bahagian dari negara ini. Presiden Rusia mengajukan tuntutan pada NATO yaitu menghentikan aktifitas militer di Ukraina dan menolak Ukraina menjadi anggota NATO (Agnew, 2013). Perang dimulai April 2024 dengan invasi ke Ukraina dan berlangsung sampai 2025. Ukraina didukung oleh anggota NATO dan AS, membuat perang kedua negara menjadi lama. Data korban menurut media internasional, pada 2024 tantara Rusia yang tewas 31.481. Tentara Ukraina yang tewas 45.100. Ini belum termasuk warga sipil dan bangunan yang hancur (Dodds.at.all, 2023).

Perang Rusia-Ukraina merupakan perang yang tidak seimbang bila dilihat dari perbandingan kekuatan militer kedua negara. Ukraina menjadi kuat dan bertahan menghadapi perang dengan Rusia, karena negara ini mendapat dukungan militer dari AS dan NATO. Upaya pengelesaian perang Rusia-Ukraina sudah dimulai. Atas inisiatif Presiden AS Donald Trump dengan mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan Presiden AS dan Presiden Rusia yang terkini berlangsung di Alaska pada 15 Agustus 2025. Pertemuan kedua kepala negara tersebut mencapai kesepakatan final, kemungkinan Perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir, karena Presiden AS Donald Trump tidak hendak menguras kekuatannya untuk membantu Ukraina secara langsung, karena dapat memicu perang nuklir dengan Rusia.

Perang India-Pakistan berlangsung berlangsung pada 7 Mei 2025-12 Mei 2025. Penyebab perang diawali dengan serangan rudal India dengan target mereka sebut kelompok militan. Pakistan menyatakan, serangan India mengenai area sipil, termasuk masjid, dan menewaskan 31 warga sipil Pakistan. Setelah serangan tersebut, Pakistan secara resmi meluncurkan roket menargetkan sejumlah kota di India, sebagai balasan atas

serangan militer India, menewaskan 12 warga sipil. Atas intervensi Presiden AS Donald Trump, kedua negara menyepakati gencatan senjata pada 12 Mei 2025, perang kedua negara berakhir dengan damai.

Perang Israel-Iran dimulai 12 Juni- 23 Juni 2025. Perang ini berawal ketika Israel melancarkan serangan udara yang mengebom lokasi fasilitas nuklir Iran, lokasi rudal, dan markas militer dengan tujuan menghancurkan program nuklir Iran. Beberapa waktu kemudian Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke Israel dengan target pusat militer dan pangkalan udara. AS mendukung kebijakan Israel untuk mengebom fasilitas nuklir Iran, AS juga melakukan serangan udara ke Iran dengan target fasilitas nuklir Iran sebagai wujud dukungan terhadap Israel. Menurut laporan berbagai media independent melaporkan jumlah korban tewas pihak Iran 436 meninggal dan 4475 terluka. Israel, 28 meninggal dan 3238 terluka. Perang kedua negara mengakibatkan kerusakan berat berbagai fasilitas gedung. Perang berakhir atas intervensi Presiden AS Donald Trump, mengumumkan bahwa kedua negara mencapai kesepakatan pada 23 Juni 2025, sekaligus mengakhiri perang kedua negara.

Perang Israel-Iran telah membalikkan opini yang dibangun Israel selama ini. Israel selalu membangun opini bahwa negaranya memiliki kekuatan militer dan pertahanan militer canggih. Selama perang dengan Iran, Israel mengalami kerusakan berat berbagai fasilitas strategis dan bangunan yang menjadi kebanggaan Israel. Kondisi ini memberikan inspirasi pada negara-negara yang selama ini mendapat ancaman Israel, bahwa apa yang dinyatakan Israel selama ini, hanya untuk menakut-nakuti negara-negara Arab. Faktanya, rudal Iran ke Israel pada masa perang kedua negara, menghancurkan sistem pertahanan Israel.

Perang Thailand-Kamboja berlangsung dari 24 -28 Juli 2025. Perang kedua negara mengakibatkan korban manusia pada kedua negara. Korban pihak Thailand, 15 tentara dan 14 warga sipil yang terbunuh. Kamboja 5 tentara dan 8 warga sipil terbunuh. Jumlah warga yang mengungsi dari perbatasan, Thailand 138.000 dan Kamboja 80.000. Latar belakang perang Thailand-Kamboja bersumber dari perebutan penguasaan atas kuil Hindu yang bernama Kuil Preah Vihear yang terletak diperbatasan kedua negara. Kuil ini merupakan

kebanggaan rakyat kedua negara, karena simbol kepercayaan dan kebudayaan masyarakat kedua negara. Pemicu perang adalah berawal dari saling tuding antara Thailand dan Kamboja. Thailand menuduh Kamboja membom fasilitas milik Thailand di perbatasan menyebabkan terbunuhnya warga sipil. Thailand membalas dengan mengerahkan pesawat tempur dengan sasaran beberapa wilayah di Kamboja. Perang kedua negara berakhir setelah kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli 2025. Kesepakatan ini tercapai melalui mediasi yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mempertemukan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Phumtham Wechayachai. Gencatan senjata ini terjadi atas dukungan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Hubungan dengan konsep penyebab perang yang dijelaskan di atas, bahwa perang dapat dipicu oleh negara yang memiliki dominasi yang lama, dan berusaha menghancurkan kekuatan negara yang baru, hal ini memiliki relevansi dalam kasus perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Iran. Rusia menganggap Ukraina terlalu mendekat pada negara-negara Uni Eropa dan NATO. Rusia menganggap hal ini bentuk ancaman pada negaranya yang letaknya Ukraina berdekatan dengan Rusia dan sebelumnya menjadi bagian bagian Uni Soviet seperti Rusia. Perang Israel-Iran, Israel berpandangan, Iran memiliki senjata nuklir dan dapat mengancam negaranya. Israel memulai perang dengan membombardir pusat tenaga nuklir Iran, kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan rudal mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas strategis Israel.

Teori tersebut tidak berlaku pada pemicu perang Israel-Palestina, India-Pakistan, dan perang Thailand Kamboja. Perang Israel- Palestina yang masih berlangsung disebabkan agresi Israel yang hendak menjadikan negara Palestina menjadi bagian negaranya. Palestina menganggap Israel sebagai negara agresor dan harus diusir dari tanah Palestina. Perang India-Pakistan dipicu oleh tindakan India yang menyerang apa yang disebutkan kelompok teoris di perbatasan kedua negara. Pakistan membalas tindakan India, karena dianggap hendak menyerang Pakistan. Perang Thailand-Kamboja dipicu oleh sengketa penguasaan tempat ibadah, masing-masing negara mengklaim termasuk wilayah mereka.

Ancam perang nuklir antara AS-China dan AS-Rusia. Presiden AS Donald Trump mengancam, China dengan mengirim kapal selam bertenaga nuklir mendekati wilayah laut China. Respon Presiden China Xi Jinping siap menghadapi ancaman Presiden Donald Trump, dengan melakukan latihan perang menggunakan kapal bermuatan senjata bertenaga nuklir. Respon Presiden China ini bukanlah sekedar gertakan semata. Pertama China merupakan negara yang memiliki persenjataan nuklir, pesawat tempur, kapal induk, dan tantara. Kedua, China memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh. Keadaan ini terlihat ketika Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor 140 % berbagai komoditi yang berasal dari China, dibalas oleh Presiden China Xi Jinping dengan menaikkan tarif impor 120 % semua jenis komoditi yang berasal dari AS. Ketiga, China merupakan negara yang tidak bersedia bernegosiasi dengan AS, ketika Presiden Donald Trump memberikan waktu pada semua negara untuk melakukan negosiasi atas kenaikan tarif impor yang diberlakukannya, Realitas ini cukup memberikan bukti bahwa China siap menghadapi ancaman AS termasuk perang nuklir. kondisi tersebut di atas mengindikasikan peluang perang nuklir antara As-China cukup besar.

Respon Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap ancaman Presiden AS sama dengan respon yang diberikan Presiden China, siap menghadapi ancaman Presiden AS, dengan menggelar latihan militer bersama China. Peluang terjadinya perang nuklir antara AS-Rusia lebih kecil. Pertama, Rusia sedang berkonsentrasi menghadapi perang dengan Ukraina, hal ini membutuhkan konsentrasi dan persenjataan. Kedua, Presiden AS dan Presiden Rusia sudah memulai dialog bilateral mencari solusi untuk mengakhiri perang Rusia Ukraina. Dialog kedua kepala negara tersebut mulai menemui jalan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, peradaban Rusia bersifat lentur, artinya peradaban Rusia dan peradaban Barat (Amerika dan Eropa) ada kesesuaian, sehingga perang nuklir kedua negara tidak mungkin terjadi (Huntington, 2006).

Para sarjana berbagai disiplin ilmu sudah banyak yang menulis tentang bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi perang nuklir adalah bisa menewaskan 400-500 juta orang, angka ini tergantung pada area yang terkena senjata nuklir dan daerah yang terdekat arah tiupan angin. Perang nuklir juga berakibat runtuhnya perekonomian, peradaban global, menghancurkan alam, dan membunuh banyak manusia. Dewasa ini

lahir berbagai gerakan sosial anti perang nuklir antar lain adalah gerakan sosial global yang menamakan dirinya International Campaign to Abolish Weapons (ICAN). Gerakan sosial global ini memiliki jaringan seluruh dunia. Penjelasan yang diberikan para sarjana akan dampak perang nuklir dan lahirnya gerakan global anti perang nuklir merupakan wujud keresahan para sarjana dan masyarakat internasional akan bahaya perang nuklir.

Perang Israel-Palestina dan ancaman perang nuklir antara AS-China mendominasi dinamika politik global dibanding perang lainnya seperti perang Rusia-Ukraina, perang India-Pakistan, perang Israel-Iran, dan perang Thailand-Kamboja. Perang Israel Palestina melahirkan gerakan sosial global yang mendukung Palestina merdeka dan gerakan sosial global anti genosida yang dilakukan Israel atas rakyat Palestina. Perang Israel Palestina menyangkut hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Para sarjana berbagai disiplin ilmu sudah banyak yang menulis akan bahaya perang nuklir. Apabila perang nuklir terjadi, kerusakan alam dan manusia melebihi kerusakan akibat bom atom seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 1945 (Shetty, 2024). Ancaman perang nuklir melahirkan gerakan sosial global anti perang nuklir. Gerakan sosial sudah mengacu pada berbagai penjelasan para sarjana tentang kerusakan yang diakibatkan oleh perang nuklir. Isu perang nuklir termasuk isu yang akan terus mempengaruhi dinamika politik global, karena isu ini menyangkut kekhawatiran manusia akan masa depan alam dan manusia. Apabila kedua kondisi ini tidak menemukan solusi, maka politik global yang stabil tidak akan pernah didapati.

B. Peran Sosial Ilmuwan Politik

Peran sosial ilmuwan politik menyikapi konflik sosial dapat ditinjau pandangan antara penganut faham behaviorisme dan penganut faham post-behavioralisme. Faham tersebut tersebut secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Komponen	Behavioralisme	Post-behavioralis
----------	----------------	-------------------

Tujuan ilmu politik	Megeneralisi fenomena empiris	Megeneralisasi fenomena empiris
Fokus studi	Penelitian secara objektif tanpa kontekstual-empiris	Penelitian empiris dan kontekstual-historis
Metode penelitian	Kuatitatif	Kuatitatif dan kualitatif
Hasil penelitian	Konstruksi generalisasi, membangun teori dan prediksi dapat diuji penelitian lainnya	Konstruksi generalisasi, membangun teori dan prediksi dapat diuji penelitian lainnya

Sumber: Wong (2011).

Perbedaan pendekatan behaviorisme dan pendekatan post-behaviorisme terletak pada fokus studi. Behaviorisme fokus pada penelitian ilmu politik bersifat objektif tanpa menyertakan kontek historis dari fenomena yang diteliti dan tanpa menyertakan situasi sosial yang terjadi. Ilmuwan politik tidak memiliki peranan sosial dalam merespon berbagai konflik dan krisis yang terjadi pada masyarakat. Argumen yang dikemukakan adalah pertama regularitas, perilaku politik dapat diekspresikan dalam generalisasi atau teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena politik, sehingga ilmu politik dapat menjadi suatu ilmu yang mampu menjelaskan dan meramalkan. Kedua verifikasi, Ilmu politik menekankan pada fenomena yang benar dapat diamati, apa yang telah diucapkan dan diperbuat dari perilaku individu atau kelompok. Ketiga teknik, penggunaan teknik untuk mendapatkan dan menginterpretasikan data. Teknik, tersebut adalah analisis multi-variasi, penelitian dengan menggunakan sampel, model matematika, simulasi. Penelitian mampu mengenyampingkan nilai-nilai yang ia miliki dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai penelitian. Keempat kuantifikasi, Penelitian Ilmu politik seharusnya dikuantifikasi dan semua penemuan seharusnya didasarkan pada data yang dapat dikuantifikasikan. Kelima bebas nilai, Ilmu politik harus bebas nilai dan objektif. Keenam sistematisasi, Penelitian ilmu politik harus sistematis, berorientasi pada teori dan dibimbing oleh teori. Ketujuh ilmu murni, pemahaman teoritis bisa membuat ilmu politik diterapkan terhadap masalah kehidupan, teori dan penerapannya merupakan usaha ilmiah. Kedelapan integrasi, ilmu politik harus terintegrasi dengan ilmu sosial lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya dalam memahami fenomena politik (Easton, 1969; Varma, 1975). Pendekatan behaviorisme lebih menekan metodologi ilmu pengetahuan dalam

penelitian. Tujuannya adalah hendak menjadikan ilmu politik menjadi ilmu yang lebih ilmiah, hasil penelitian pada wilayah tertentu dapat menjadi rujukan penelitian pada wilayah berbeda.

Pendekatan post-behavioralisme memberikan landasan peran kontribusi ilmuwan sosial merespon konflik politik yang mengarah pada kerusakan tatanan global. Ilmu politik post-behavioralisme tidak menolak penerapan metodologi ilmu pengetahuan dalam penelitian politik, namun harus dikombinasikan dengan peran dan tanggung jawab dalam merespon konflik global yang mengarah kerusakan tatanan global dan mengancam peradaban manusia. Argumen yang dikemukakan pendekatan post-behavioralisme yaitu pertama, penelitian ilmiah yang tidak mempunyai makna pada masalah-masalah sosial yang mendesak, maka penelitian itu tidak berguna untuk dilakukan. Kedua, ilmu politik harus memberikan penekanan utama pada perubahan sosial bukan pada pemeliharannya. Ketiga, ilmuwan politik harus ikut memikirkan dan bertanggung jawab atas konflik sosial yang terjadi yang membawa kekhawatiran pada masyarakat akan masa depan mereka. Keempat, sistem nilai yang memainkan peran penting dalam penelitian politik tetap dipertahankan, untuk mencapai tujuannya yang benar dan dikembalikan pada posisinya sentral. Kelima, ilmuwan politik memiliki tugas dalam masyarakat yakni melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, ilmu memiliki komitmen untuk bertindak dan mewarnai seluruh penelitian yang ada dalam ilmu politik. Ketujuh, politisasi dari semua unsur seperti asosiasi dan universitas sangat diperlukan untuk mendukung peran ilmuwan sosial tersebut. Ciri umum ilmu politik post-behavioralisme dikenal dengan relevansi dan tindakan (Easton, 1969; Ripley, 1985; Grigsby, 2011). Pendekatan post-behavioralisme ini, memberikan landasan teoritik pada ilmuwan politik untuk melakukan peran sosialnya.

D. Model Peran Sosial Ilmuwan Politik Merespon Konflik Global

Ilmuwan Sosial harus memberikan respon positif pada konflik global dewasa ini guna melindungi peradaban manusia. Peran ilmuwan politik telah melakukan peran sosialnya ketika menghadapi konflik sosial yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya.

Beberapa model peran sosial ilmuwan politik yang pernah dilakukan yaitu, pertama memberikan pemikiran positif melalui penelitian. Model ini diterapkan oleh Samuel P. Huntington (1991). Karya tersebut meneliti tentang proses terjadi gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia seperti di Amerika Latin dan di Asia diwarnai konflik kekerasan antara kelompok pro-demokrasi vs pro-status quo. Huntington dalam karyanya tersebut memberikan solusi dan petunjuk pada kelompok pro-demokrasi untuk memperjuangkan demokrasi, yang ditulisnya dalam sub bab setiap pembahasannya. Sub bab tersebut pada intinya bentuk dukungan dan solusi yang diberikan ilmuwan politik pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat untuk membangun tatanan baru. Petunjuk yang ditulis Huntington dalam karya tersebut diperoleh melalui penelitiannya yang dilandasi teori dan metode penelitian yang ketat, jadi bukan hanya sekedar petunjuk yang tidak memiliki landasan ilmu pengetahuan.

Kedua, melakukan aksi. Model ini diterapkan ilmuwan politik Indonesia Deliar Noer. Ketika Indonesia mengalami demokratisasi pada 1998 dimana terjadi situasi politik yang tidak menentu, karena terjadinya pertarungan kepentingan antara kelompok pro-status-quo vs pro-demokrasi. Deliar Noer sebagai seorang ilmuwan politik mendirikan partai politik yang bernama Partai Umat Islam (PUI). Pengurus partai mayoritas berasal dari kalangan ilmuwan sosial. Tujuan Deliar Noer mendirikan partai bukan untuk meraih perolehan suara mayoritas di DPR, tapi hendak mengawal proses demokrasi Indonesia yang sedang dibangun melalui partai politik. Peran lainnya yang dilakukan Deliar Noer adalah menulis berbagai artikel mengkritisi dan mengevaluasi kondisi politik yang sedang terjadi, dan memberikan solusi untuk mengatasi. Deliar Noer pada masa krisis politik juga mengadakan diskusi terbuka dengan para ilmuwan sosial, politisi dan mahasiswa menyikapi dan mengevaluasi arah demokrasi Indonesia yang akan dibangun. Apa yang dilakukan Deliar Noer merupakan wujud peran ilmuwan politik dalam membangun sistem demokrasi Indonesia yang stabil (Jalal, 2024).

Ketiga, pernyataan sikap dan bergabung dengan gerakan mahasiswa. Model ini pernah dilakukan ilmuwan politik bersama-sama ilmuwan sosial dan ilmuwan eksakta, ketika terjadi krisis politik pada 1998. Pada masa ini gerakan pro-demokrasi yang dimotori mahasiswa menghendaki Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai

Presiden Indonesia. Gerakan pro-demokrasi ini mendapat tantangan dari kelompok pro-status quo. Para ilmuwan seluruh Indonesia melalui perguruan tinggi masing-masing, mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang isinya menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Peran sosial ilmuwan politik lainnya adalah ikut aksi demonstrasi bersama mahasiswa.

Peran ilmuwan politik merespon konflik global berupa perang Israel-Palestina yang dan ancaman perang nuklir dapat memilih salah satu model peran yang pernah dilakukan para ilmuwan politik atau kombinasi dari semua model tersebut. Peran ini penting, karena konflik Israel-Palestina akan terus mempengaruhi dinamika politik global, karena menyangkut hak suatu bangsa untuk merdeka dan membela hak asasi manusia. Ancaman perang nuklir AS-China melahirkan kekhawatiran masyarakat global akan masa depan mereka, bila perang ini terjadi.

E. Simpulan

Konflik global berupa perang pada kasus yang dibahas tersebut di atas disebabkan oleh ketakutan suatu negara akan kekuatan militer negara lain yang semakin besar, dan memulai perang untuk mencegah berkembangnya kekuatan negara yang membangun kekuatan militernya tersebut. Penyebab perang model ini terjadi pada perang Rusia-Ukraina dan perang Israel-Iran. Perang ada yang sudah selesai seperti perang India-Pakista, perang Israel-Iran, dan Perang Thailand-Kamboja dan ada perang yang masih berlanjut seperti perang Israel-Palestina dan perang Rusia-Ukraina. PBB sebagai lembaga internasional tidak memiliki peran menengahi konflik global tersebut.

Konflik global yang tersisa saat ini adalah perang Israel-Palestina dan ancaman perang nuklir antara AS-China. perang Israel-Palestina dan ancaman perang nuklir-AS-China bila tidak menemukan solusi, maka perdamaian global yang stabil tidak akan pernah tercapai, karena menimbulkan gerakan sosial global mendukung kemerdekaan Palestina merdeka dan gerakan sosial anti perang nuklir. Isu Kemerdekaan Palestina berkaitan dengan hak semua bangsa untuk merdeka dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan Israel pada rakyat Palestina. Ancaman perang nuklir AS-China,

menimbulkan kekhawatiran masyarakat global akan masa depan mereka, bila perang nuklir ini terjadi akan menghancurkan alam dan peradaban global.

Ilmuwan politik memiliki landasan teoritik untuk memainkan peran sosialnya untuk merespon konflik global tersebut melalui pendekatan post-behavioralisme. Peran sosial ilmuwan politik ini diperlukan karena konflik global dimaksud yang berdampak pada ketidaksatbilan tatanan global dan munculnya kekhawatiran masyarakat global akan masa depan mereka. PBB sebagai institusi internasional telah gagal memainkan perannya memelihara tatanan politik global yang stabil.

Peran ilmuwan sosial merespon konflik global dapat menerapkan model yang pernah dilakukan ilmuwan politik yaitu, memberikan pemikiran positif melalui penelitian, melakukan aksi dengan mendirikan organisasi, dan pernyataan bersama menggunakan institusi perguruan tinggi. Model lainnya adalah mengkombinasikan ketiga model tersebut.

Daftar Pustaka

- Agnew, J. (2013). Territory, politics, governance. *Territory, Politics, Governance*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.1080/21622671.2013.765754>
- Brown, Benjamin (2019). The Israeli-Palestinian Conflict the Source of the Problem is the Source of the Solution, *World Affair the Journal International Issues*, Vol 23 No.3, (58-65).
- Capeland, D. (2000). *The Origins of Major War*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- David, Mars & Stoker, Gerry (1995). *Theory and Methods in Political Science*, London: Macmillan Press.
- Dodds, Klaus, Taylor, Zack, Akbari, Azadeh, Broto, Venesa Castan, Detterbeck. (2023) Klaus The Russian invasion of Ukraine: implications for politics, territory and governance, *Territory, Politics, Governance Journal*, 11 (8). <https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2256119>.
- Easton. David (1969). The new revolution in political science. *American Political Science Review*, 63, 1051-1061.

- Grigsby, Ellen (2011). History of the Discipline, Ishiyama, John T. & Breuning, Marijke (ed), *21st Century Political Science A Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication Inc, pp. 3-10.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: Oklahoma Press.
- Huntington Samuel P. (2006), *The Clash of Civilization Remaking of world Order*, New York: Simon & Schuster, pp. 26-27.
- Jalal, Asran. (2024). Mengenang Profesor Doktor Deliar Noer Sebagai Ilmuwan Politik Indonesia. Unas Repository, <https://repository.unas.ac.id>
- Pratiwi, Fadhila Inas, Syarafi, M. Aryo Rasil, Nauvarian, Demas (2022) Israeli-Palestinian Conflict Beyond Resolution: A Critical Assessment, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 26 No.2, 10.22146/jsp.66935.
- Ripley, Randal B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, Nelson House Publishe.
- Shetty, Shatabhisha (2024). Introduction: Reducing the Risk of Nuclear Weapons Use in Northeast Asia, *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 7 (1), 71-77, <http://doi.org/10.1080/25751654.2024.2370453>.
- Varma, SP. (1975). *Modern Political Theory*, Vikas Publishing House.
- Wong, James, K.L. (2011). Evolution of Science in Political Science, Ishiyama, John T. & Breuning, Marijke (ed), *21st Century Political Science A Reference Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication Inc, pp. 506-551.